

Beberapa Pejabat Negara Siap Hadir di Tanwir Muhammadiyah

Jum'at, 17-02-2017

MUHAMMADIYAH.OR.ID, AMBON – Tanwir merupakan permusyawaratan tertinggi dalam Muhammadiyah di bawah Muktamar. Pada tanggal 24 hingga 26 Februari 2017 Tanwir Muhammadiyah akan digelar di Kota Ambon, dengan mengangkat tema Kedaulatan dan Keadilan Sosial untuk Indonesia Berkemajuan.

Dijadwalkan pada pembukaan Tanwir tersebut akan dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo dan ditutup oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Selain itu, Tanwir kali ini juga akan dihadiri Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Panglima TNI, Kapolri, Menteri Pertahanan dan Keamanan RI, Menteri Agraria, serta Gubernur-Gubernur bagian Timur Indonesia.

Seperti dijelaskan Marpuji Ali, Bendahara Pimpinan Pusat Muhammadiyah, pada Tanwir tersebut akan digelar Seminar-Seminar dengan berbagai topik pembahasan. Diantaranya, yaitu seminar dengan tema Kebijakan Pendidikan di Tingkat Nasional, yang akan diisi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy dan juga Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi, Muhammad Nashir.

Selain itu, dalam seminar tersebut juga akan membahas mengenai masalah akselerasi mutu pendidikan di Indonesia Timur. Dengan pemateri Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Hamid Muhammad, Mantan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Suyanto, Kepala Badan Akreditasi Nasional untuk SD dan SMP Abdul Mu'ti dan juga Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, Muhammad Saleh Tyo.

“Sedangkan untuk seminar Kedaulatan Politik narasumbernya ada Prof. Saldi Isra, untuk Kedaulatan Hukum Prof. Samsudin Haris, sedangkan untuk Kedaulatan Ekonomi Rizal Ramli,” terang Marpuji, Kamis (16/2) ketika ditemui redaksi Muhammadiyah.or.id.

Tidak cukup sampai disitu, pada Tanwir tersebut juga akan ada seminar mengenai Kedaulatan Maritim “Kelautan dan Perikanan”, yang akan diisi oleh Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti. Selain Menteri Susi, turut hadir juga nantinya Arif Satria, Dosen Institut Pertanian Bogor yang juga Staff Ahli Kementerian Perikanan dan Kelautan, Pangdam Pattimura, dan juga dari Asosiasi Nelayan, Jalaludin Salampesi.

Marpuji berharap dengan adanya Tanwir Muhammadiyah tersebut nantinya dapat memberikan sebuah semangat dan inspirasi kepada masyarakat bahwa dari sisi ekonomi politik dan hukum di Indonesia masih perlu dibenahi. “Harapan kami masyarakat membuka mata, bahwa mereka punya hak politik ekonomi dan lainnya. Kalau merasa haknya belum bisa diberikan pemerintah maka mereka berani bicara dengan cara seperti Muhammadiyah, yaitu dengan menyampaikan pikirannya pada pemerintah,” terang Marpuji.

“Kalau mereka (masyarakat) diberi wawasan lebih luas maka mereka akan tau kemana harus mengadu dan tidak sewenang-wenang,” jelas Marpuji.

Pada Tanwir tersebut, Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga akan melakukan Penandatanganan Kerjasama dengan empat lembaga pemerintah, yaitu dengan Kementerian Agraria, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga dengan TNI Angkatan Laut. **(adam)**

